



Polda Razia Siswa SMP Bawa Motor

JOGJA-Polda DIY akan merazia siswa SMP yang membawa sepeda motor. Razia dilakukan sebagai upaya untuk menangani aksi kekerasan di jalanan atau *klithih*.

Sunartono & Muhammad Nadhir Attamimi
sunartono@harianjogja.com

► Setiap sekolah terutama SMP sudah melarang siswanya agar tidak membawa sepeda motor.

► Ada kecenderungan aksi *klithih* berdasarkan kelompok ekonomi.

Orang tua diimbau untuk tidak memberikan fasilitas motor kepada anak yang masih di bawah umur. Sejumlah tempat parkir yang memfasilitasi penitipan motor juga perlu diberikan pembinaan.

Wakapolda DIY Brigjen Pol Karyoto menjelaskan dalam menangani *klithih* jangan hanya melihat korban dan pelakunya tetapi lihat orangtua dan lingkungannya, sehingga semua pihak perlu bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini.

Polda DIY terus meningkatkan patroli dalam rangka menindaklanjuti *klithih* yang saat ini terjadi di Jogja, terutama dalam hal pencegahan. Selain penindakan hukum, Polda

DIY juga fokus pada penanganan anak membawa sepeda motor, karena selama ini pelaku *klithih* selalu menggunakan sepeda motor.

"Kami terus tingkatan patroli dari [Direktorat] Binmas jalan-jalan ke sekolah untuk memberikan arahan. Dan kami juga sosialisasikan anak-anak SMP jangan pakai motor, karena pelaku *klithih* tidak ada yang pakai sepeda kan, kalau ngliith pakai sepeda, *ketangkap*,"

katanya di Kepatihan, Jogja, Senin (10/2).

Sebelumnya, Polres di wilayah hukum Polda DIY sudah membentuk tim untuk menangani *klithih*. Bahkan polisi juga merazia remaja yang nongkrong tengah malam dengan alasan yang tidak jelas.

Wakapolda berharap tidak ada pelajar SMP yang memakai sepeda motor di wilayah DIY. Bahkan pelajar SMA juga harus dibatasi bagi mereka yang secara legal telah memiliki SIM.



Tegeh Suroso

► Halaman 6

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

ak Lanjut

Ditanggapi

Diketahui

da Pers

Polda Razia...

Jika belum memiliki SIM tetapi nekat mengendarai, hal itu bisa membahayakan diri sendiri. Ia mencontohkan seorang yang tidak punya SIM ketika melihat polisi akan panik dahulu kemudian mengesbut dalam berkendara. "Kami inginnya di SMP tidak ada [yang pakai] motor dan SMA pun yang bawa harus yang sudah punya SIM," ucapnya.

Mantan Direskrim Polda DIY ini menyadari setiap sekolah terutama SMP sudah melarang siswanya agar tidak membawa motor. Namun ada juga yang sengaja dititipkan di luar, seperti warung dan rumah dekat sekolah. Sehingga saat pulang mereka kembali bisa mengendarai motor mereka.

"Kami akan turun [razia], sebenarnya mereka [pemilik tempat] juga tidak suka jadi tempat penitipan, misalnya titip barang hilang, kami punya kewajiban untuk menilang karena mereka membawa kendaraan yang tidak punya SIM, membahayakan diri sendiri," katanya.

Di masyarakat, kata dia, razia anak di bawah umur yang membawa motor akan digiatkan. Polisi diminta lebih respons lagi ketika ada anak kecil membawa sepeda motor paling tidak dihentikan. Kemudian dilakukan penilangan agar orang tuanya yang mengambil sembari diberikan pembinaan. Orang tua memiliki peran penting, diimbau untuk bijak dalam memberikan fasilitas kepada anak. Jangan asal mampu kemudian memberikan fasilitas sepeda motor kepada anak yang justru akan membahayakan diri mereka. "Kami juga mengajak kepada orang tua untuk lebih bertanggung jawab dan bijak apakah orang tua memberikan motor kepada anak 15 tahun itu bijak tidak. Harusnya diukur, dihitung. Jangan hanya karena mampu membeli motor, kelas satu [kelas VII] SMP sudah dibelikan, akhirnya berselweran," ungkapnya.

Polda DIY, kata Wakapolda, akan mengedepankan preventif, premitif dengan dibarengi penindakan untuk menghadapi kekerasan di jalan. "Semua sudah gerak, fokus gerak Polda gerak semua intelijen menelisik *klithih* akar masalahnya apa? Apa dari minuman, razia miras, kalau dari obat kami razia narkoba, ini ada

kaitannya," ujar dia.

Di sisi lain, perlu ada motivasi bagi pelajar dengan menghadirkan kakak kelas mereka yang sudah sukses. Sehingga pelajar SMA lebih termotivasi untuk melakukan tindakan yang positif demi masa depan, daripada ikut tergabung dalam aksi *klithih*. Memberikan bimbingan karier, agar para pelajar memiliki kebanggaan kepada SMA-nya karena bisa melahirkan orang hebat. "Jangan hanya bangga hanya bisa tawuran, tetapi [pelajar harus] diarahkan pada pemahaman] paling hakiki adalah SMA itu melahirkan manusia yang berkualitas," katanya.

Kepala Badan Kesbangpol DIY Agung Supriyono akan melibatkan ormas dan kelompok jaga warga dalam menangani *klithih* agar tidak meresahkan masyarakat. Butuh sinergi dari semua pihak dalam menuntaskan persoalan ini. "Kami perlu melihat bagaimana latar belakang mereka, saya yakin betul berbagai komponen bisa dilibatkan [dalam penanganan] secara pelan tetapi memang, terutama agar sekarang masyarakat mampu mengendalikan diri, jangan marah maupun main hakim sendiri," ujarnya.

Perhatian Keluarga

Menurut Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jogja berbagai macam faktor yang menyebabkan anak-anak yang notabene masih pelajar melakukan aksi *klithih*, salah satunya karena alasan kurangnya perhatian keluarga.

Kepala LPKA Jogja, Teguh Suroso mengungkapkan selama berkecimpung dengan lembaga pembinaan anak, didapati ada kecenderungan aksi *klithih* berdasarkan kelompok ekonomi. *Pertama*, kelompok ekonomi menengah seringkali dijumpai *klithih* secara individu. *Kedua*, kelompok menengah ke atas biasanya kelompok geng.

Kelompok individu cenderung aksinya hanya dilakukan oleh dua orang saja. Namun, geng kelompok biasanya lebih dari dua yang biasa dimotori geng-geng sekolah. "Yang perlu diwaspadai yakni *klithih* secara individu, karena mereka enggak punya tujuan, ketika keluar malam mereka asal beraksi dan tidak ada sasaran," kata Teguh kepada

Harian Jogja, Senin.

Ia mengungkapkan latar belakang yang membuat kelompok individu ini melakukan aksinya di jalanan rata-rata karena faktor keluarga yang *broken home*, tidak harmonis, kurangnya perhatian dan lain sebagainya. "Begitu juga kelompok sebagian besar kurangnya pengawasan orang tua. Mereka berangkat sekolah tapi terkadang tidak sampai, ketika ditangkap keluarga malah kaget. Karena mereka kurang kasih sayang," ujarnya.

Teguh menuturkan alasan-alasan tersebut merupakan hasil pendekatan dan studi bersama kampus di DIY terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang telah diputus oleh pengadilan negeri yang telah dijatuhi pidana dan ditempatkan untuk pembinaan di LPKA Jogja yang berlokasi di Kota Wonosari. "Kami di sini selalu mengedepankan aspek-aspek pembinaan seperti pembinaan kepribadian, kemandirian, sosial. Jadi apa pun yang terjadi anak ini masa depannya tidak boleh hilang," ujarnya.

Untuk aksi geng kelompok, Teguh menuturkan, motif mereka melakukan aksi *klithih* tersebut hanya untuk hura-hura agar diakui oleh kelompoknya. Mereka melakukan aksi *klithih* tak pernah mengincar harta korbananya. "Mereka tidak mengincar harta benda tetapi hanya ingin diakui oleh kelompoknya," ujarnya.

Teguh menuturkan mereka yang selama ini melakukan aksi berujung penyesalan. Mereka tidak akan lagi mengulangnya. Hal itu terbukti dari hasil pembinaan selama ini. Selain itu, terbukti LPKA tidak pernah menangani para pelaku residivis kasus yang sama. "Setelah melakukan tindakan tersebut, mereka yang jarang dekat dengan orang tua tiba-tiba pulang pasti dekat, biasa mereka *mijitin* orang tua, mungkin merasa bersalah. Esoknya mereka ditangk-up polisi," ungkapnya.

LPKA Jogja sendiri tengah membina sebanyak 17 anak dengan berbagai macam kasus seperti perlindungan anak tujuh orang, asusila satu anak, pembunuhan satu anak, penganiayaan satu orang, laka Lantas satu orang, narkoba empat, dan pengeroyokan dua orang.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kantor Kesatuan Bangsa			

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005